



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FATAH SA.
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 513970

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.297.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m²/270 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 212.100.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/400 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.233.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m²/275 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 632.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/150 m² di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 98.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 296.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 229.371.314

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.921.371.314

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.921.371.314

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.